REFORMULASI KEBIJAKAN CADANGAN PANGAN DESA DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Dwi Fatma Almunawaroh
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah,Temanggung, Indonesia
e-mail: fatmatazakka@gmail.com
**author correspondence*

Abstrak

Ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan daerah yang tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga oleh keterjangkauan dan stabilitas akses masyarakat terhadap pangan. Kabupaten Temanggung memiliki potensi produksi pangan yang relatif tinggi, namun masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi produksi komoditas, kesenjangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, serta kerentanan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah akibat gejolak harga pangan. Penelitian ini bertujuan merumuskan reformulasi kebijakan Cadangan Pangan Desa sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan sekaligus perlindungan daya beli rumah tangga rentan di Kabupaten Temanggung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, Focus Group Discussion (FGD), studi dokumentasi, serta didukung data sekunder yang bersumber dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, serta dokumen kebijakan terkait. Informan dipilih secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang dipadukan dengan analisis kebijakan deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kapasitas produksi pangan daerah belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan Cadangan Pangan Desa sebagai mekanisme stabilisasi pasokan dan harga. Reformulasi kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola Cadangan Pangan Desa berbasis potensi produksi lokal, pengembangan sistem peringatan dini kerawanan pangan, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta mekanisme distribusi yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan. Model kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, dan memperkuat perlindungan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: *cadangan pangan desa; daya beli; rumah tangga rentan; ketahanan pangan; kebijakan publik*

Abstract

Food security as a foundation of regional development is determined not only by food availability, but also by the affordability and stability of community access to food. Temanggung Regency has a relatively high food production potential, but still faces challenges in the form of fluctuations in commodity production, gaps in the Expected Food Pattern (PPH) score compared to the provincial and national averages, and the vulnerability of low-income household purchasing power due to food price fluctuations. This study aims to formulate a reformulation of the Village Food Reserve policy as an instrument for strengthening food security while protecting the purchasing power of vulnerable households in Temanggung Regency. The study used a qualitative approach with a policy analysis design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, Focus Group Discussions (FGDs), documentation studies, and supported by secondary data sourced from the National Food Agency, the Central Statistics Agency, the Temanggung Regency Food Security, Agriculture and Fisheries Office, and related policy documents. Informants were selected purposively and developed through snowball sampling. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña combined with descriptive-comparative policy analysis. The research results show that the high regional food production capacity has not been fully accompanied by the strengthening of Village Food Reserves as a mechanism for stabilizing supply and prices. Policy reforms are aimed at strengthening Village Food Reserve governance based on local production potential, developing an early warning system for food insecurity, collaboration between stakeholders, and targeted distribution mechanisms for vulnerable households. This policy model is expected to improve regional food security, maintain food price stability, and strengthen the protection of community purchasing power in a sustainable manner

Keywords : *village food reserves; purchasing power; vulnerable households; food security; public policy*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan yang berperan dalam menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara atas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau (Sabri et al., 2026). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya diukur dari aspek ketersediaan pangan, tetapi juga keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan. Dalam konteks pembangunan daerah, ketahanan pangan menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan sistem ketahanan pangan yang kuat memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi guncangan ekonomi, perubahan iklim, maupun gangguan distribusi pangan (Luckyanayu & Valdiansyah, 2026).

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah agraris di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025 produksi berbagai komoditas pangan, seperti padi, jagung, cabai, bawang merah, telur, daging, dan ikan masih memberikan kontribusi penting terhadap penyediaan pangan daerah. Namun demikian, perkembangan produksi menunjukkan fluktuasi pada beberapa komoditas strategis. Produksi padi, misalnya, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, sementara ketersediaan pangan pokok pada tahun 2024 hanya mencapai 90,20% dan meningkat menjadi 98,63% pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingginya potensi produksi belum sepenuhnya menjamin stabilitas ketersediaan pangan sepanjang waktu (Dede Abdurahman, 2026).

Selain aspek ketersediaan, tantangan ketahanan pangan juga tercermin dari aspek keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Gejolak harga berbagai komoditas pangan pokok, seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, dan daging, menyebabkan penurunan daya beli, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah. Kelompok rumah tangga rentan memiliki proporsi pengeluaran pangan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi sehingga lebih sensitif terhadap kenaikan harga pangan(Rahmalia et al., 2026). Dalam kondisi tersebut, kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin akses pangan menjadi faktor penting untuk mencegah meningkatnya kerawanan pangan dan kemiskinan (Pelupes & Sungkawaningrum, 2025).

Indikator lain yang menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Meskipun skor PPH Kabupaten Temanggung meningkat dari 79,70 pada tahun 2021 menjadi 89,87 pada tahun 2025, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan berpotensi menurunkan kualitas gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap perubahan harga komoditas pangan tertentu (Sungkawaningrum & Suciyati, 2025).

Berbagai kebijakan ketahanan pangan selama ini lebih banyak berorientasi pada peningkatan produksi melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, maupun pengembangan kawasan pertanian. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh kelompok masyarakat. Pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa gangguan distribusi, keterbatasan cadangan pangan, dan lemahnya tata kelola pangan di tingkat lokal sering menjadi penyebab utama terjadinya gejolak harga ketika produksi mengalami penurunan

atau terjadi bencana (Sungkawaningrum danHartono, 2022). Oleh karena itu, diperlukan instrumen kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan di tingkat desa.

Salah satu instrumen yang memiliki potensi strategis adalah Cadangan Pangan Desa. Cadangan Pangan Desa merupakan bagian dari sistem cadangan pangan pemerintah yang berfungsi sebagai mekanisme antisipasi terhadap kerawanan pangan, stabilisasi pasokan, serta bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana maupun guncangan ekonomi. Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan Cadangan Pangan Desa tidak hanya berfungsi sebagai buffer stock, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu menjaga keberlanjutan akses pangan rumah tangga rentan. Dengan tata kelola yang baik, cadangan pangan desa dapat memperkuat ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan produksi masyarakat setempat, penguatan kelembagaan desa, dan kolaborasi lintas sektor (Viona et al., 2025).

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada konsep ketahanan pangan yang dikembangkan oleh FAO, yang menekankan empat dimensi utama, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Penelitian ini juga menggunakan teori kebijakan publik yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, konsep perlindungan sosial adaptif menjadi landasan untuk menjelaskan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli rumah tangga rentan ketika terjadi gejolak harga pangan. Integrasi ketiga perspektif tersebut memberikan dasar konseptual dalam merumuskan model kebijakan Cadangan Pangan Desa yang lebih adaptif dan berkelanjutan (Retno Windarti Auwalina, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penguatan cadangan pangan masyarakat mampu meningkatkan ketahanan pangan lokal dan mengurangi risiko kerawanan pangan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek produksi pangan, distribusi pangan, atau evaluasi program cadangan pangan secara parsial. Penelitian mengenai reformulasi kebijakan Cadangan Pangan Desa yang mengintegrasikan aspek produksi pangan daerah, perlindungan daya beli rumah tangga rentan, serta tata kelola kelembagaan desa masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat kabupaten(Daulay et al., 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif mengenai peran Cadangan Pangan Desa sebagai instrumen kebijakan ketahanan pangan daerah.

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini membangun kerangka berpikir bahwa potensi produksi pangan daerah merupakan modal dasar dalam pembentukan Cadangan Pangan Desa. Tata kelola Cadangan Pangan Desa yang efektif akan meningkatkan stabilitas pasokan pangan, mengurangi gejolak harga, memperkuat akses pangan masyarakat, serta menjaga daya beli rumah tangga rentan. Pada akhirnya, penguatan fungsi Cadangan Pangan Desa diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok tani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan masyarakat (Wahyuningsih et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa reformulasi kebijakan Cadangan Pangan Desa yang berbasis potensi produksi lokal, penguatan kelembagaan, dan tata kelola kolaboratif akan lebih efektif dalam memperkuat ketahanan pangan serta melindungi daya beli rumah tangga rentan dibandingkan pendekatan kebijakan yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan ketahanan pangan daerah sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif,

dan berkelanjutan (Hapsari & Rudiarto, 2017).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merumuskan alternatif kebijakan Cadangan Pangan Desa berdasarkan kondisi empiris ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung. Analisis kebijakan memungkinkan peneliti mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi implementasi kebijakan yang telah berjalan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perlindungan daya beli rumah tangga rentan(Mariyanto, 2025).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Temanggung berdasarkan indikator produksi pangan, ketersediaan pangan, konsumsi pangan, dan perlindungan masyarakat rentan. Selanjutnya dilakukan analisis kebijakan untuk menghasilkan model reformulasi Cadangan Pangan Desa yang sesuai dengan karakteristik wilayah penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan sebagai berikut. Kabupaten Temanggung memiliki potensi produksi pangan yang tinggi namun masih mengalami fluktuasi produksi beberapa komoditas strategis. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Temanggung masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai program ketahanan pangan sehingga menarik untuk dikaji efektivitas kebijakannya (Wibowo, 2025).

Dengan desain analisis kebijakan untuk merumuskan reformulasi kebijakan Cadangan Pangan Desa di Kabupaten Temanggung. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling dan dapat berkembang menggunakan snowball sampling hingga mencapai data saturation. Data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan *Focus Group Discussion* (FGD), serta data sekunder yang bersumber dari Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, RPJMD Kabupaten Temanggung, dokumen Cadangan Pangan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, berbagai peraturan terkait, serta artikel ilmiah nasional dan internasional (Nurjakiah, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, observasi, dan FGD. Analisis difokuskan pada indikator produksi pangan, ketersediaan pangan, akses pangan, konsumsi pangan (Skor Pola Pangan Harapan), tata kelola Cadangan Pangan Desa, dan perlindungan daya beli rumah tangga rentan(Renaldy, 2022).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, kemudian dipadukan dengan analisis kebijakan deskriptif-komparatif untuk merumuskan alternatif kebijakan. Perhitungan ketersediaan pangan mengacu pada formula Badan Pangan Nasional yang membandingkan jumlah beras tersedia dan cadangan pangan terhadap kebutuhan konsumsi penduduk, sedangkan disparitas harga dihitung dari selisih harga komoditas tingkat kabupaten dan provinsi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu, member checking, serta peer debriefing guna meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian (Arifin et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Sebelum menguraikan hasil penelitian secara lebih rinci, bagian ini terlebih dahulu menyajikan gambaran umum mengenai kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung sebagai konteks awal bagi pembahasan selanjutnya. Gambaran umum ini disusun berdasarkan data dan indikator yang relevan guna memberikan pemahaman

menyeluruh mengenai capaian, tantangan, serta dinamika ketahanan pangan yang terjadi di wilayah tersebut. Untuk memudahkan pembacaan dan analisis, gambaran umum tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Komoditas	2021	2022	2023	2024	2025	Tren
Padi (ton)	121.262,7	105.992,7	114.471,7	91.022,2	100.582,3	Fluktuatif menurun
Jagung (ton)	38.611,4	38.611,4	38.611,4	36.057,4	39.119,3	Relatif stabil
Bawang Putih (ton)	10.355,3	8.088,4	10.493,3	9.631,2	6.898,0	Menurun
Bawang Merah (ton)	11.102,1	18.662,4	17.901,8	21.263,2	22.932,7	Meningkat
Cabai Rawit (ton)	20.802,9	38.525,4	52.095,0	56.876,2	74.486,3	Meningkat signifikan
Tembakau (ton)	12.585,6	10.562,6	9.685,7	9.439,0	8.824,2	Menurun
Kopi Robusta (ton)	8.841,6*	8.994,3	8.476,9	8.329,4	8.171,5	Relatif stabil
Kopi Arabika (ton)	955,2	1.003,0	992,4	649,3	659,3	Menurun

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung (2025), diolah penulis.

Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris yang memiliki struktur ekonomi berbasis sektor pertanian. Selama periode 2021–2025, produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan menunjukkan dinamika yang berbeda pada setiap komoditas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan daerah dipengaruhi oleh faktor iklim, luas panen, produktivitas lahan, serta perubahan pola tanam petani.

Produksi padi sebagai komoditas pangan utama mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Produksi sebesar 121.262,7 ton pada tahun 2021 menurun menjadi 100.582,3 ton pada tahun 2025. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen dari 20.553,8 hektare menjadi 16.516 hektare. Meskipun produktivitas lahan relatif stabil di atas 6 ton per hektare, penurunan luas panen menyebabkan total produksi beras daerah mengalami penurunan sehingga berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan pokok.

Berbeda dengan padi, produksi jagung menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, produksi kembali meningkat hingga mencapai 39.119,3 ton pada tahun 2025. Peningkatan produktivitas jagung dari 4,50 ton/ha menjadi sekitar 5,05 ton/ha menunjukkan adanya perbaikan teknologi budidaya dan efisiensi usaha tani. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jagung berpotensi menjadi komoditas pendukung diversifikasi pangan di Kabupaten Temanggung.

Komoditas hortikultura memperlihatkan perkembangan yang beragam. Produksi bawang merah meningkat secara konsisten hingga mencapai 22.932,7 ton pada tahun 2025, sedangkan produksi cabai rawit meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, produksi bawang putih mengalami penurunan menjadi 6.898 ton pada tahun 2025 akibat berkurangnya luas panen. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan hortikultura di Kabupaten Temanggung masih menghadapi tantangan dalam menjaga kesinambungan produksi beberapa komoditas strategis (Nurjakiah, 2024).

Pada kelompok tanaman perkebunan, produksi tembakau dan kopi cenderung mengalami penurunan selama periode penelitian. Penurunan tersebut berkaitan dengan berkurangnya luas areal panen serta perubahan preferensi petani terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi komoditas pertanian agar ketahanan pangan daerah tidak terlalu bergantung pada satu jenis tanaman tertentu (Renaldy, 2022).

b. Analisis Ketersediaan Pangan Daerah

Tabel 2. Realisasi Ketersediaan Pangan Pokok Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2025

Tahun	Ketersediaan Pangan (%)
2021	147,06
2022	122,54
2023	133,42
2024	90,20
2025	98,63

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan pangan pokok Kabupaten Temanggung mengalami tren yang menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tingkat ketersediaan pangan mencapai 147,06%, kemudian menurun menjadi 122,54% pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 133,42% pada tahun 2023. Akan tetapi, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup tajam hingga hanya mencapai 90,20%, sebelum meningkat kembali menjadi 98,63% pada tahun 2025. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun terakhir, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2021 (Ojo et al., 2026).

Penurunan ketersediaan pangan terutama dipengaruhi oleh menurunnya produksi padi akibat penyusutan luas panen serta meningkatnya kebutuhan konsumsi pangan seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Di samping itu, faktor perubahan iklim, pergeseran pola tanam, alih fungsi lahan, dan meningkatnya risiko gagal panen turut memengaruhi kemampuan daerah dalam menjaga kecukupan pangan sepanjang tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas saja belum cukup apabila tidak diimbangi dengan penguatan cadangan pangan daerah dan sistem distribusi yang efektif (Bulkis et al., 2026).

c. Analisis Daya Beli Rumah Tangga Rentan

Analisis menunjukkan bahwa daya beli rumah tangga rentan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga pangan pokok. Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki proporsi pengeluaran pangan yang relatif besar sehingga kenaikan harga beras, cabai, bawang merah, telur, maupun minyak goreng secara langsung menurunkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kondisi tersebut semakin terasa ketika terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan akibat fluktuasi produksi pangan daerah (Ziaul, 2023).

Selain harga pangan, disparitas harga antarwilayah juga menjadi faktor yang memengaruhi keterjangkauan pangan masyarakat. Perbedaan harga komoditas antara Kabupaten Temanggung dengan tingkat provinsi mencerminkan adanya variasi biaya distribusi, ketersediaan stok, serta efisiensi rantai pasok pangan. Disparitas harga yang tinggi berpotensi meningkatkan inflasi pangan daerah sehingga kelompok rumah tangga rentan menjadi pihak yang paling terdampak karena memiliki kemampuan adaptasi ekonomi yang lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi (Kapisa et al., 2025).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa gejolak inflasi pangan tidak hanya memengaruhi konsumsi pangan rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap kualitas konsumsi masyarakat. Ketika harga pangan meningkat, rumah tangga rentan cenderung mengurangi konsumsi pangan hewani, sayur, dan buah, serta lebih memilih bahan pangan pokok yang relatif murah. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas gizi keluarga dan berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, penguatan kebijakan Cadangan Pangan Desa menjadi penting sebagai instrumen stabilisasi pasokan, pengendalian harga, dan perlindungan daya beli masyarakat rentan pada saat terjadi gejolak pangan (Arifin et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kabupaten Temanggung masih menghadapi tantangan meskipun daerah ini memiliki potensi produksi pertanian yang relatif besar. Fluktuasi produksi padi, penurunan beberapa komoditas perkebunan, serta menurunnya tingkat ketersediaan pangan pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian belum sepenuhnya menjamin ketahanan pangan daerah. Temuan ini memperkuat konsep ketahanan pangan yang dikemukakan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh dimensi ketersediaan (*availability*), tetapi juga oleh akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Dengan demikian, peningkatan produksi pangan harus diikuti oleh penguatan tata kelola cadangan pangan agar pasokan tetap terjaga ketika terjadi gangguan produksi maupun distribusi (Renaldy, 2022).

Penurunan produksi padi selama periode penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan daerah sangat dipengaruhi oleh perubahan luas panen dibandingkan produktivitas lahan. Produktivitas padi di Kabupaten Temanggung relatif stabil, namun berkurangnya luas panen menyebabkan total produksi mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi faktor strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyimpulkan bahwa konversi lahan pertanian merupakan salah satu penyebab menurunnya kapasitas produksi pangan di berbagai wilayah Indonesia sehingga diperlukan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan yang lebih efektif.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa peningkatan produksi hortikultura, khususnya bawang merah dan cabai rawit, belum secara otomatis meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Komoditas hortikultura memiliki karakteristik harga yang sangat berfluktuasi mengikuti musim panen dan distribusi. Ketika produksi meningkat secara bersamaan, harga di tingkat petani cenderung turun, sedangkan pada saat produksi menurun harga meningkat tajam di tingkat konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sistem distribusi, penyimpanan, dan pengelolaan cadangan pangan.

Penurunan persentase ketersediaan pangan pokok hingga mencapai 90,20% pada tahun 2024 menjadi indikator bahwa sistem pangan daerah masih rentan terhadap berbagai gangguan. Secara teoritis, kondisi tersebut menggambarkan bahwa dimensi *food availability* belum sepenuhnya mampu menjamin *food security* apabila tidak didukung oleh sistem cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Cadangan Pangan Desa memiliki fungsi strategis sebagai *buffer stock* yang dapat menjaga kesinambungan pasokan pangan ketika produksi mengalami penurunan atau terjadi gangguan distribusi akibat bencana, perubahan iklim, maupun gejolak pasar.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rumah tangga rentan merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kenaikan harga pangan. Tingginya proporsi pengeluaran pangan menyebabkan sedikit kenaikan harga beras, cabai, telur, maupun minyak goreng secara

langsung menurunkan daya beli masyarakat. Temuan ini mendukung teori akses pangan (*food access*), yang menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan, tetapi juga kemampuan ekonomi rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Dengan demikian, kebijakan stabilisasi harga pangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ketahanan pangan daerah.

Disparitas harga antarwilayah yang masih terjadi menunjukkan bahwa mekanisme distribusi pangan belum berjalan secara optimal. Perbedaan harga komoditas antara Kabupaten Temanggung dan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan adanya ketidakefisienan rantai pasok, biaya distribusi yang tinggi, serta belum optimalnya integrasi pasar pangan. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak cukup hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan kelembagaan distribusi pangan, penyediaan informasi harga secara real time, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, reformulasi kebijakan Cadangan Pangan Desa perlu diarahkan pada perubahan paradigma dari kebijakan yang bersifat reaktif menjadi kebijakan yang adaptif dan preventif. Cadangan Pangan Desa tidak hanya difungsikan sebagai persediaan pangan saat terjadi bencana, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi harga, pengendalian inflasi pangan, dan perlindungan daya beli rumah tangga rentan. Reformulasi tersebut mencakup penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas pengelola cadangan pangan, pemanfaatan produksi lokal sebagai sumber cadangan, digitalisasi data stok pangan, serta pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi kerawanan pangan.

Penelitian ini menghasilkan suatu temuan konseptual bahwa efektivitas Cadangan Pangan Desa ditentukan oleh keterpaduan empat komponen utama, yaitu ketersediaan produksi lokal, kapasitas kelembagaan desa, mekanisme distribusi yang responsif, dan perlindungan daya beli rumah tangga rentan. Keempat komponen tersebut saling berinteraksi membentuk sistem ketahanan pangan lokal yang adaptif. Temuan ini memperluas konsep ketahanan pangan FAO dengan menempatkan Cadangan Pangan Desa sebagai instrumen penghubung antara dimensi ketersediaan pangan dan akses pangan pada tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model konseptual baru yang menekankan pentingnya tata kelola cadangan pangan berbasis desa sebagai bagian dari strategi pembangunan ketahanan pangan daerah.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memperkuat sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, dan pelaku usaha pangan dalam membangun sistem Cadangan Pangan Desa yang berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi daerah, penyediaan anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan stok dan distribusi pangan. Dengan demikian, Cadangan Pangan Desa tidak hanya menjadi program administratif, tetapi berkembang menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis dilakukan pada satu kabupaten sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik ketahanan pangan berbeda. Kedua, penelitian lebih banyak menggunakan data sekunder periode 2021-2025 sehingga belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara Cadangan Pangan Desa, stabilitas harga, dan daya beli rumah tangga. Ketiga, penelitian belum mengembangkan model pengukuran efektivitas Cadangan

Pangan Desa menggunakan pendekatan ekonometrika atau system dynamics. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dengan analisis spasial maupun pemodelan kebijakan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Cadangan Pangan Desa dalam memperkuat ketahanan pangan dan melindungi daya beli rumah tangga rentan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya ditentukan oleh tingginya produksi pangan, melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola Cadangan Pangan Desa, stabilitas pasokan, distribusi pangan, dan kemampuan daya beli masyarakat. Meskipun Kabupaten Temanggung memiliki potensi produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan yang cukup besar, hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi produksi beberapa komoditas strategis, penurunan persentase ketersediaan pangan pokok pada periode tertentu, serta masih rendahnya kualitas konsumsi pangan yang tercermin dari capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan Cadangan Pangan Desa perlu diarahkan sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai cadangan saat keadaan darurat, tetapi juga sebagai mekanisme stabilisasi harga pangan, pengendalian inflasi pangan, dan perlindungan daya beli rumah tangga rentan melalui penguatan kelembagaan desa, pemanfaatan produksi pangan lokal, sistem informasi stok pangan, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, kelompok tani, dan masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual dengan mengembangkan model kebijakan Cadangan Pangan Desa berbasis empat pilar, yaitu ketersediaan produksi lokal, penguatan kelembagaan, distribusi pangan yang responsif, dan perlindungan daya beli rumah tangga rentan. Model tersebut memperluas implementasi konsep ketahanan pangan dengan menempatkan Cadangan Pangan Desa sebagai penghubung antara dimensi ketersediaan pangan dan akses pangan pada tingkat lokal. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Temanggung sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi pada daerah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis data sekunder sehingga belum mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh Cadangan Pangan Desa terhadap stabilitas harga pangan maupun daya beli rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah daerah disarankan menyusun regulasi yang memperkuat tata kelola Cadangan Pangan Desa, meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola, mengembangkan sistem informasi pangan berbasis digital, serta mengintegrasikan Cadangan Pangan Desa dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, melibatkan lebih banyak kabupaten sebagai lokasi penelitian, serta mengembangkan model evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan ekonometrika, system dynamics, atau analisis spasial sehingga efektivitas Cadangan Pangan Desa dalam memperkuat ketahanan pangan dan melindungi daya beli rumah tangga rentan dapat diukur secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Temanggung atas dukungan, fasilitasi, serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Kontribusi yang diberikan sangat membantu dalam penyelesaian

penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, bantuan, dan kerja sama sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Supriyanto, Anang Rohmad, & Jatmiko. (2024). Efektivitas Kebijakan Ketahanan Pangan Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Desa Ngampel Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. *Jurnal EBA*, *11*(2), 213–232. https://doi.org/https://ejournal.undar.or.id/index.php/eBA/article/view/421

Bulkis, S., Agussabti, Nugroho, A., Summase, A. P., Mudatsir, R., & Summase, I. (2026). Institutional framework for improving food security in crisis-prone areas in Indonesia. *Journal of Agriculture and Food Research*, *27*(February), 102774. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2026.102774

Daulay, J., Kaloko, N., Ria, R., Hasibuan, A., Sari, S. K., Ekonomi, F., Bisnis, D., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia : Tantangan Urbanisasi Dan Peluang Diversifikasi Pangan. *International, Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, *4*(4), 219–225. https://doi.org/https://e-journalbarokahpublisher.com/index.php/JMBS/article/view/183

Dede Abdurahman. (2026). Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Bintang Coffe. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, *23*(1), 14–24. https://doi.org/https://doi.org/10.25134/a872x873

Fatmawati Sungkawaningrum, Sri Hartono, M. H. H. (2022). Determinants of Community Decisions to Lend Money to Loaners. *Intern. Journal of Profess. Bus. Review*, *7*(3), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i3.0510

Hapsari, N. I., & Rudiarto, I. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan dan Ketahanan Pangan dan Implikasi Kebijakannya di Kabupaten Rembang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, *5*(2), 125. https://doi.org/10.14710/jwl.5.2.125-140

Kapisa, R. Y., Maulana, A., & Sukirman, R. F. (2025). Inovasi Desa Berbasis Kearifan Lokal: Tinjauan Literatur terhadap Praktik Terbaik di Indonesia. *Journal of Digital Community Services*, *2*(2), 24–29. https://doi.org/10.69693/dcs.v2i2.32

Luckyanayu, I. H., & Valdiansyah, R. H. (2026). Transformasi UMKM Berkelanjutan : Integrasi Akuntansi Hijau, Kompetensi Digital, dan Kebijakan Publik. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, *23*(01), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/10.25134/v088wh52

Mariyanto, J. (2025). Krisis global dan implikasinya bagi pertanian indonesia perubahan iklim, konflik geopolitik, dan spekulasi pasar. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, *2*(1), 22–43. https://doi.org/epublikasi.pertanian.go.id/berkala/jp3

Nurjakiah. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI DI DESA PUPUYUAN KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN. *Jurnal Kebijakan Publik*, *1*(3), 498–508. https://doi.org/https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/562

Ojo, T. O., Kehinde, A. D., Tijani, A. A., & Kolawole, O. M. (2026). Impact of contract farming on the food security outcomes of cassava-producing households in Osun state. *Journal of Agriculture and Food Research*, *29*(June), 103093. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2026.103093

Pelupes, F. W., & Sungkawaningrum, F. (2025). Neglected Financial Inclusion : A Study of the Financing Disparity of Ultra-Micro Enterprises in Indonesia. *Journal of Islamic Economics AndBusiness*, *5*(1), 254–271. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jieb.v5i1

Rahmalia, B., Jannah, W., & Handini, M. A. (2026). Literasi Keuangan dan Akses Sumber Belajar terhadap Perilaku Finansial Melalui Financial Self-Efficacy. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, *23*(01), 54–65. https://doi.org/https://doi.org/10.25134/ph2r8m69

Renaldy. (2022). Efektivitas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2l) Dalam Upaya Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Pasirkaliki Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *8*(20), 282–289. https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Retno Windarti Auwalina. (2026). Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi, Produksi Padi, serta Bantuan Pangan terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. *Independent: Journal Of Economics*, *6*(1), 199–223. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/independent.v6i1.75095

Sabri, M. F., Trinugroho, I., Magli, A. S., Law, S. H., Wahyono, B., Ridhwan, M. M., & Septianto, F. (2026). Bridging digital capabilities and financial resilience: A comparative study of FinTech, AI literacy, and financial inclusion among households in Malaysia and Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *12*(2), 100759. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2026.100759

Sungkawaningrum, F., & Suciyati, N. (2025). Optimization of Ijarah in Sharia Business : A Maqasid Sharia Perspective on Rights and Obligations. *Journal of Mujaddid Nusantara*, *8030*(2), 52–60. https://doi.org/https://doi.org/10.62568/jomn.v2i1.278

Viona, M., Nabila, Katanging, D. G., & Candra, M. (2025). Ekonomi Politik Ketahanan Pangan di Indonesia: Peran Negara Dalam Menghadapi Krisis Pangan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(11), 502–508. https://doi.org/https://doi.org/10.5281zenodo.15613605

Wahyuningsih, A., Hamid, A., & Afandi, M. (2025). Manajemen Ketahanan Pangan Di Kabupaten Parigi Moutong. *Journal of Publicness Studies*, *2*(02), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/jps.v2i2.2185

Wibowo, D. R. P. (2025). Kontribusi Agribisnis Terhadap Ketahanan Pangan Nasional: Literatur Review. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(8), 652–662. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i8.699

Ziaul, S. (2023). Environmental Sustainability: A Major Component of Sustainable Development. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, *4*(2), 620–627. https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i2.296